

2024



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEMADAM
KEBAKARAN KAB. LUWU





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan : Andi Kambo (Komp. Perkantoran Pemda Kab. Luwu) Tlp.0471-.....Kode Pos 91994

B E L O P A



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 194 /DAMKARMAT/VII/2023

Tentang

**PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN TAHUN 2024**

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Setelah :

- Menimbang : a. Bahwa sebagai dokumen perencanaan tahunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan OPD Kabupaten Luwu;
 16. Keputusan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu;
 17. Keputusan Bupati Luwu Nomor 4 /1/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Para Kepala Satuan Kerja selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2017;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017;
 19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 116 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Luwu merupakan dokumen perencanaan yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2023, perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024.
- (2) Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan bagi:

- a. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2024;
- b. Penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu.

Pasal 2

Sistematika Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu

Terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BAB V	: PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum pada lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetaan ini.

Ditetapkan Di : Belopa
Pada Tanggal : 10 Juli 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Luwu



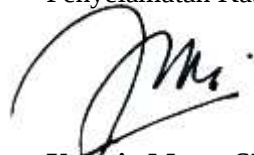
Yernia Maya, SE
Nip. 19640204 199403 1 010

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Luwu
Nomor :
Tanggal : 10 Juli 2023

**SUSUNAN TIM
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU**

PenanggungJawab : Kepala Dinas
Ketua : Sekretaris
WakilKetua : Kasubag Program dan Keuangan
Sekertaris : Kasubag Program dan Keuangan
Anggota : 1. Kabid Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan
2. Kabid Pencegahan,Peningkatan Kapasitas SDM danSarpras
3. Kasi. Operasi Pemadaman dan Investigasi
4. Kasi. Evakuasi Penyelamatan dan Investigasi
5. Kasi.Sarana dan Prasarana
6. Kasi. Inspeksi Proteksi Kebakaran
7. Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan
8. Sub Koordinator Kesiapsiagaan dan Komunikasi

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Luwu



Yermia Maya, SE

Nip. 19640204 199403 1 010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2024, telah selesai disusun.

Penyelesaian Rencana Kerja (Renja) merupakan hasil kerja tim penyusun, yang dilaksanakan secara bersama-sama, untuk mendapatkan hasil rumusan rencana yang optimal yang sesuai dengan bidang tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu.

Penyusunan Rencana Kerja mendorong untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas program dan unggul serta melakukan perubahan kearah perbaikan dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu, Berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bahan pedoman dan arah pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Luwu secara signifikan

Belopa, 10 Juli 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Luwu,



Yermia Maya, SE

Nip. 19640204 199403 1010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud & Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	19
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	20
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	20
3.3 Program dan Kegiatan	21
BAB IV. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	24
BAB V. PENUTUP	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2024 merupakan bentuk implementasi pelaksana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sekaligus mempedomani RKPD Kabupaten Luwu tahun 2024 yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu .

Perencanaan Tahun 2024 merupakan Perencanaan Tahun ke lima untuk periode perencanaan pembangunan tahun 2019-2024, sehingga dasar yang diacu adalah RPJPD Kabupaten Luwu serta RKPD Kabupaten Luwu tahun 2024.

Renja merupakan pedoman perencanaan perangkat daerah untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan perangkat Daerah secara rinci. Renja mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari Renstra perangkat daerah selama lima tahun. Keterkaitan kedua dokumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra sesuai arahan operasional dalam RKPD
2. Renja merupakan acuan untuk menyusun Program dan kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru dibentuk pada tahun 2017 berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Nomor 112 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemadam kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat urusan kebakaran dan tugas pembantuan.

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 ini secara khusus membahas konsep rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga akan berfungsi sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan memaduserasikan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pembangunan baik yang berskala nasional maupun berskala daerah.

Secara umum, Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu tahun 2024 memuat kerangka rencana pembangunan dan kerangka anggaran yang dirinci menurut alokasi pendanaan/ pagu indikatif yang akan digunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan ditingkat pusat dan daerah wajib menyusun dokumen perencanaan.

Pada tahun 2024 fokus dan prioritas pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masuk dalam fokus peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana wilayah dengan prioritas pembangunan meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, oleh karenanya dalam Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 lebih menitik beratkan

pada Kebakaran yaitu penanganan ,pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum terjadinya kebakaran seperti pendidikan dan pelatihan anggota pemadam kebakaran, simulasi penanganan kebakaran,gladi dan simulasi penanggulangan Kebakaran.

Proses penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan Renja Tahun 2024 ini mengacu pada P-Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2024. Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA SKPD.

Sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu yang tertuang dalam P-Renstra yaitu :“ **Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religius**”, dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang profesional, berwibawa, amanah dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi usaha mikro menengah dan perluasan lapangan kerja;
5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religius;
7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat pedesaan;
8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan;
9. Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia untuk mendorong partisipasi public yang dinamis dan kondusif;

10. Mewujudkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu maka Peran dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu menduduki peran yang strategis dalam pelayanan masyarakat utamanya dalam hal pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dan hal ini sangat terkait dengan **misi ke-1 yaitu Mewujudkan Pemerintah yang profesional, bewibawa, amanah, transparan, dan akuntabel** dan **misi ke-10 yaitu Mewujudkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.**

Untuk pembagian pelaksanaan tugas dan fungsi serta optimalisasi Pemadaman yang pelaksanaannya 24 jam pelaksanaan tugas dan fungsi dari siang dan malam untuk memadamkan setiap terjadinya kebakaran, dengan motto pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci yang akan dicapai pada Tahun 2024 adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Ketentuan ini telah mengatur Standar Pelayanan Minimal sebagai ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Terkait dengan pelaksanaan Urusan Wajib Trantibun Linmas Sub Urusan Kebakaran terhitung mulai tahun 2019 Standar Pelayanan Minimal Pemadam Kebakaran telah diatur secara khusus sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pada Standar Pelayanan Minimal tersebut hanya terdiri dari 1 (satu) point yaitu layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam waktu tanggap (response time).

Adapun standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal

Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Luwu yang menunjukkan tingkat capaian kinerja menurut Standar Pelayanan Minimal sebagaimana yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

1.2 LANDASAN HUKUM

Pedoman yang menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standard Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Didaerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
14. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (P-RPJMD) kabupaten luwu tahun 2019-2024.
15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 175 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu;

16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2019 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Tahun 2019-2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah merupakan dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2024 dan hubungannya dengan RKPD Kabupaten Luwu. Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas pemadam Kebakaran ini, untuk mewujudkan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu dan untuk memberikan informasi tentang prioritas pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024.

sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kongkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Luwu.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana;
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tetap sasaran dan berkesinambungan;

4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah;
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2024
6. sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu disusun secara deskriptif dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Tahun Laludan Capaian Renstra Perangkat daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Tahun 2023 merupakan tahun peralihan dalam periode dokumen perencanaan, baik Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu, maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Luwu. Karena periode RPJMD dan Renstra perangkat daerah Tahun 2009-2014 telah berakhir, sedangkan RPJMD dan Renstra perangkat daerah tahun 2019-2024 sedang dalam proses Penyusunan. Pada tahun 2023 Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
 - a. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Pencegahaan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 dan pencapaian kinerja renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu 2019-2024 dilakukan untuk mengidentifikasi jauh mana kemampuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dsan Penyelamatan serta hambatan dan

permasalahan yang dihadapi. Evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu menggunakan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja.

Untuk tahun yang akan datang akan diupayakan peningkatkan kerjasama dan koordinasi yang optimal dengan instansi terkait dalam menanggulangi bahaya kebakaran. Hal tersebut tentu tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Luwu, terutama dari segi penambahan anggaran untuk memenuhi kegiatan yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu pada tahun 2023 telah melaksanakan 2 (Dua) Program yang sifatnya supporting program terhadap program utama. Terhadap masing-masing program utama. Evaluasi hasil pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 serta Pencapaian Renstra selengkapnya disajikan pada Tabel T-C. 2.1 berikut ini.

Secara Umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Tahun 2022 dapat terlaksana dengan Baik sebagaimana direncanakan. Sesuai dengan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Total Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Luwu sebesar **Rp. 5.263.812.712,-**

Realisasi Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 5.210.368.468,-** atau mencapai **98,98 %** dari anggaran belanja Tahun 2022.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Tahun 2022 melaksanakan 1 Program 6 Kegiatan dan 19 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 yang termuat dalam DPA pokok maupun DPA Perubahan dan telah dimuat dalam penetapan kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perjanjian Target Kinerja Pimpinan Satuan Kerja yang akan dicapai Tahun 2022.

2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditentukan dalam target Renstra terdapat 3 indikator yaitu (1) Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat kabupaten, (2) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten dan (3) Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Untuk tahun 2023, Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Luwu belum maksimal atau belum mencapai target 100 persen dengan rasio capaian baru mencapai rata-rata 99 persen, baik itu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota, maupun pada Indikator kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Adanya kesenjangan/gap pada pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran antara lain disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Luwu masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan luas wilayah. Saat ini WMK yang ada

masih berjumlah 4 (empat) WMK yang diharapkan dapat memproteksi 16 Wilayah Kecamatan dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu. Sehingga kedepan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal diharapkan dapat terbangun 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dapat memproteksi 6 (enam) Kecamatan yang belum terjangkau WMK.

Selain kesenjangan/ gap pada cakupan pelayanan, indicator kinerja waktu tanggap (response time) juga belum mencapai 100 persen, hal ini terutama disebabkan oleh karena jumlah sarana dan prasarana khususnya jumlah unit mobil pemadam kebakaran belum memenuhi standarisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Didaerah. Jumlah armada mobil pemadam kebakaran yang ada saat ini baru mencapai 6 (enam) unit dari jumlah kebutuhan sebanyak 12 (dua belas) unit.

Adapun keberhasilan pencapaian realisasi kinerja pelayanan sangat dipengaruhi oleh upaya-upaya dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu. Upaya tersebut tercermin dari terbitnya Peraturan Bupati Luwu Nomor 175 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu, yang mengatur tentang pembentukan 3 (tiga) unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada 3 (tiga) WMK pada tahun 2019, selain itu dalam Kebijakan Umum APBD sejak Tahun Anggaran 2017 telah direalisasikan pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran pada setiap tahun anggaran, hal tersebut tentu saja sangat mendukung Optimalisasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten Luwu.

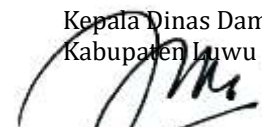
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C 2.2 berikut ini

Tabel T-C. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu

No	Indikator Kinerja	SPM	IKK	Target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	90	95	95,3	95,5	Tiap Tahun Meningkat
2	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100	100	100	100	100	97	100	100	100	Tiap Tahun Meningkat

Belopa, 10 Juli 2023

Kepala Dinas Damkar
Kabupaten Luwu



YERMIA MAYA, SE

Np.19640204 199403 1 010

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Sesuai dengan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, perlunya menetapkan permasalahan yang menjadi faktor penghambat dan pendorong terlaksananya program-program kegiatan.

Dalam Penyusunan program belum terintegritasnya perencanaan program secara lintas sektor dan wilayah tidak terpadu, makanya diperlukannya pemahaman standar teknis dalam pelaksanaan program tersebut.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pemadam kebakaran. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian operasi pemadam dan penyelamatan urusan kebakaran;
3. Pelaksanaan teknis administrasi Dinas , monitoring dan evaluasi, serta pelaporan urusan kebakaran;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dinas Pemadam Kebakaran melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra kebakaran dan pasca kebakaran.

Pada fungsi komando, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan penanggulangan kebakaran dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat kebakaran.

Sedangkan pada fungsi pelaksana, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan penanggulangan kebakaran secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2. Pemasalahan

Permasalahan dicantumkan agar terjadi kesinambungan dengan rencana program/kegiatan, karena pada dasarnya program/kegiatan yang direncanakan adalah merupakan langkah dalam pemecahan masalah yang telah/sedang dan akan dihadapi dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi diakibatkan minimnya sarana dan Prasarana seperti kurangnya pos Pemadaman Kebakaran dalam wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) seperti yang diamanatkan yang ditentukan dalam standar Pelayanan Minimal (SPM), kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran, Kurangnya pelatihan tentang peningkatan kecakapan anggota/Aparatur Pemadam Kebakaran, dan Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung sehingga permasalahan yang timbul adalah pelayanan pencegahan dan pengendalian terhadap bahaya kebakaran yang belum maksimal.

Permasalahan harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran 5 (lima) tahun Kedepan. Tantangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu yang harus dihadapi adalah:

1. manajemen penanganan masalah bahaya kebakaran, berbagai program dan kegiatan harus terencana dengan baik guna memenuhi kebutuhan ketersediaan sarana dan prasarana serta personil pemadam kebakaran yang belum maksimal
2. Pengembangan Pelayanan Kabupaten Luwu sebagai kota budaya dan pusat perdagangan merubah paradigma dalam pelayanan pencegahan bencana kebakarandan pengendaliannya, sehingga system pelayanan yang pada mulanya bertumpu pada pemadaman, berubah dengan masuknya unsur

pencegahan dan pembinaan masyarakat, meningkatnya pemakaian dan transportasi bahan yang mengandung racun dan bahaya lainnya termasuk bahan mudah meledak (*eksplosif*), bahan radio-aktif dsb, yang bisa membahayakan masyarakat maka perhatian perlu pula dicurahkan kepada penanggulangan benda/bahan berbahaya (dikenal sebagai *hazmat* atau *hazardous materials*).

3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk proaktif dalam pencegahan kebakaran, dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dari instansi terkait akan bahaya kebakaran sehingga peristiwa bencana kebakaran kerap terjadi pada pemukiman warga dan pembakaran lahan yang masih dilakukan secara sengaja.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu dalam dinamika perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota tentunya memberi peluang bagi Dinas Pemadam Kebakaran dalam menyediakan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
2. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di daerah yang tentunya memberi peluang bagi dinas pemadam kebakaran untuk meningkatkan peralatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri.
3. Adanya Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (Retkar) ditengah-tengah masyarakat dan adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran.
4. Semakin berkembangnya teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran untuk menunjang kegiatan di bidang bencana kebakaran yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana kebakaran.

2.3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program

Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Luwu adalah merupakan salah satu Dinas dalam struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Luwu yang kondisi obyektif dalam pelayanan yang diberikan belum optimal. Banyak permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya layanan tersebut antara lain, kecakapan SDM masih sangat rendah, kurangnya sarana dan prasarana operasional dan belum menempatkan kepuasan pengguna sebagai suatu keharusan.

Sistem Manajemen kepegawaian yang menjadi salah satu kepegawaian yang menjadi salah satu kendala tidak tercapainya suatu profesionalisme. Seharusnya diadakan pembenahan secara menyeluruh yang meliputi sistem rekrutmen pegawai, pengukuran kinerja, sistem penggajian maupun penerapan reward yang konsisten dan jelas bagi segenap aparatur pemerintah.

Dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap pencapaian program, perlunya dilengkapi sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan peningkatan kualitas SDM, serta perlu disetujui program-program yang telah direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2024 semua program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ada Dalam RKPD tersebut telah diakomodir dalam Renja 2024. Namun karena keterbatasan anggaran yang ada maka ada beberapa Kegiatan yang ada dalam Renja Tahun 2024 tidak diakomodir dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 dan Juga terdapat selisih rupiah dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tersebut. Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel T-C. 2.3

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan hasil rumusan dan usulan dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling. Dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang insidental dan harus segera ditangani seperti kejadian kebakaran. Usulan Program dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 disajikan pada Tabel T-C. 2.4

Tabel T-C. 2.4

Usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan

Tahun 2024 Kabupaten luwu

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

N o	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volu me	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Mobil Damkar	Belopa	Tersedianya Mobil Damkar	2 Buah	Tidak bisa dilaksanakan
2	Pembangunan Tandom Air Posko Damkar	Belopa Dadeko Ponrang dan walenrang	Tersedianya Tandom Air di Posko Damkar	4 Buah	Tidak bisa dilaksanakan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap keselarasan kebijakan nasional maupun provinsi berkenaan dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan yang terkait dengan Tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, yang kemudian dijabarkan melalui RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas identifikasi kebijakan nasional dan provinsi Sulawesi Selatan melalui program peningkatan kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan kegiatan pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dan kegiatan pembentukan satuan relawan kebakaran/satlakar

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*), dimana penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat urusan kebakaran.

Demi keselarasan arah pembangunan ditingkat Pemerintah Kabupaten Luwu yang dipandu oleh Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, dibawah ini diuraikan sasaran hingga program utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu agar terlihat jelas

kesinambungan alur perencanaannya dalam pencapaian tujuan yaitu Peningkatan Pelayanan Sosial dan penanganan kebencanaan.

Sasaran :

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- Meningkatkan Kapasitas dan kapabilitas manajemen kebakaran.

Indikator Kinerja Sasaran :

- Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten sebesar 78,80 % (BB)
- Cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 99,3 %
- Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran sebesar 99,7%

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk melaksanakan Visi dan Misi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu telah ditentukan program dan kegiatan yang dirancang melalui Tahapan Verifikasi bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Luwu, untuk dioperasionalisasikan pada tahun 2024 yang terdistribusikan pada 2 program, 6 Kegiatan dan 19 sub program kegiatan, terdiri dari :

Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu

Program ini dimaksud untuk pencapaian optimalisasi segala urusan dalam pelayanan administrasi keuangan, Kepegawaian, Umum, Pemeliharaan dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan.

1. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi tercapainya penilaian dan evaluasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan PD serta peningkatan kinerja aparatur PD pada tahun mendatang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN, Pada Sub Kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.3.048.075.601,-
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, Pada Sub Kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 129.120.000,-

2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi Administrasi penatausahaan barang milik daerah pada SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, Pada Sub Kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 8.400.000,-

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pencapaian optimalisasi pelayanan administrasi Umumguna penunjang urusan pemerintahan yang terpadu dan berkualitas. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- e. Penyediaan Bahan/Material
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

Pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 281.225.505,-

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi segala penyediaan Jasa yang mendukung kelancaran, kenyamanan dan peningkatan kinerja aparatur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 2.097.815.500,-

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk Peningkatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehabilitasi sebagai penunjang Urusan Pemerintahan dalam kelancaran dan kenyamanan kinerja aparatur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

Pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 27.756.000,-

- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 113.950.350,-

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 12.119.300,-

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 6.071.285,-

II. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran alam daerah Kabupaten/Kota.

a. Pencegahan Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota

Pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 191.092.660,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Adapun jumlah program yang direncanakan untuk tahun 2024 sebanyak 2 program 6 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan termasuk UPT Sektor. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dapat dilihat pada tabel T-C. 3.1.

BAB V

PENUTUP

Upaya mewujudkan Kabupaten Luwu Menjadi Kabupaten maju di Indonesia wajib dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Luwu. Dalam rangka mengimplementasikan seluruh kewenangan dibidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat urusan kebakaran dan tugas pembantuan, maka Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 telah disusun secara baik dengan mengikuti seluruh tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Semoga Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Luwu



Yermia Maya, SE
PKT. Pembina Muda
Nip.196402041994031010

Tabel T-C. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2022 Kabupaten Luwu

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6		9		10 = 5+7+9		11 = 10 / 4	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100	6,584,853,541			100	5,263,812,712	100	5,210,368,469	100	98.98	100	6,575,199,301	200	11,785,567,770	50	2,946,391,943
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100	34,907,800			100	7,896,700	100	7,893,650	100	99.961	100	34,907,800				
	Penyusunan perencanaan dokumen perangkat daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun					2	7,896,700	2	7,893,650	100.00	99.96						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100	2,268,367,051			100	2,165,374,514	100	2,140,561,646	100	98.854	100	2,215,405,011				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan					26	2,053,336,314	26	2,028,541,246	100.00	98.79						
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) Tahun					5	103,800,000	5	103,800,000	100.00	100.00						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang disusun					14	8,238,200	14	8,220,400	100.00	99.78						
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Cakupan Penyenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100	8,400,000			100	8,400,000	100	8,400,000	100	100	100	8,400,000				
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan barang milik daerah					1	8,400,000	1	8,400,000	100.00	100.00						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Predikat kinerja baik	100	261,636,000			100	120,780,000	100	120,456,000	100	99.732	100	261,636,000				
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri,khusus hari-hari tertentu)					215	120,780,000	215	120,456,000	100.00	99.73						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi Umum	100	691,066,690			100	367,798,095	100	367,771,425	100	99.993	100	691,066,690				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					10	9,999,700	10	9,995,800	100.00	99.96						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan					12	39,886,000	12	39,886,000	100.00	100.00						
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan					2	15,789,795	2	15,789,450	100.00	100.00						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan					12	17,050,000	12	17,050,000	100.00	100.00						
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan					25	37,606,600	24	37,595,175	100.00	99.97						
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi					3	62,990,000	3	62,980,000	100.00	99.98						

T.C. 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Luwu

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA 2024				
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5,915,626,201.00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7,958,160,296.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5,915,626,201.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7,958,160,296.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Luwu	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100.00	5,724,533,541.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Luwu	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100.00	7,417,919,696.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	100%	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	100%	29,850,750.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	13,638,600.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2,774,500.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2,956,500.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2,409,900.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2,132,650.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD	Belopa	Jumlah Laporan capaian Kinerja an Ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD	Belopa	Jumlah Laporan capaian Kinerja an Ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen	4,285,300.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	5 Dokumen	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	5 Dokumen	1,653,300.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100%	3,177,195,601.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100%	2,348,597,399.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	27 ASN	3,048,075,601.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	27 ASN	2,198,612,699.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Penatausahaan Keuangan SKPD Yang Melakukan Verifikasi	5 OB	129,120,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Belopa	Jumlah Penatausahaan Keuangan SKPD Yang Melakukan Verifikasi	5 OB	129,120,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	12,626,500.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 Dokumen	8,238,200.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	100%	8,400,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	100%	8,400,000.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	8,400,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belopa	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	8,400,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100%	246,636,000.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Luwu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	225 Stell	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belopa	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	225 Stell	148,500,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 ASN	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belopa	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 ASN	74,511,000.00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang Mengikuti bimbingan teknis	2 ASN	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belopa	Jumlah ASN yang Mengikuti bimbingan teknis	2 ASN	23,625,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	281,225,505.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	423,257,180.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	4,345,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belopa	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	15,975,710.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Luwu	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang di sediakan	15 Jenis	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belopa	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang di sediakan	15 Jenis	95,500,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	21,915,700.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belopa	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	25,000,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	9,578,200.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belopa	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	11,372,600.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2 Jenis	11,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belopa	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2 Jenis	24,000,000.00
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Luwu	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	15 Jenis	17,993,605.00	Penyediaan Bahan/Material	Belopa	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	15 Jenis	18,219,870.00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Luwu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2 Jenis	37,014,000.00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Belopa	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2 Jenis	38,000,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu	Jumlah perjalanan dinas Biasa	129 OK	167,379,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belopa	Jumlah perjalanan dinas Biasa	129 OK	183,189,000.00
		Kab. Luwu	Jumlah perjalanan dinas dalam Kota	42 OK			Belopa	Jumlah perjalanan dinas dalam Kota	42 OK	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 OB	12,000,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Belopa	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 OB	12,000,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	1,655,286,000.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	4 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	4 Unit	1,501,676,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	8 jenis	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	8 jenis	98,610,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Perlengkapan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan	3 jenis	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Belopa	Jumlah Perlengkapan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan	3 jenis	55,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100.00	2,097,815,500.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100.00	2,386,950,000.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	600 Surat	33,120,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belopa	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	600 Surat	33,800,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	63,550,500.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belopa	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	82,800,000.00
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab. Luwu	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 kali	8,545,000.00	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Belopa	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 kali	8,950,000.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	1,992,600,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	2,261,400,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu	cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	159,896,935.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	318,942,367.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Luwu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	2 Unit	27,756,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belopa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	2 Unit	53,548,350.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10 Unit	113,950,350.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10 Unit	120,950,350.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	15 Jenis	12,119,300.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	15 Jenis	82,515,150.00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	25 Jenis	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belopa	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	25 Jenis	31,903,039.00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	35 jenis	6,071,285.00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Belopa	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	35 jenis	30,025,478.00
	PROGRAM PENCEGAHAAN, PENANGANAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran	100.00	191,092,660.00	PROGRAM PENCEGAHAAN, PENANGANAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Belopa	Cakupan Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran	100.00	540,240,600.00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	BIDANG PENCEGAHAAN, PENINGKATAN KAPASITAS SDM & SARPRAS				191,092,660.00	BIDANG PENCEGAHAAN, PENINGKATAN KAPASITAS SDM & SARPRAS				494,410,000.00
	Pencegahaan, Pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Persentase Pelayanan Penanganan bencana yang terlapor		191,092,660.00	Pencegahaan, Pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	Belopa	Persentase Pelayanan Penanganan bencana yang terlapor	100.00	387,100,000.00
	Pencegadaan Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan beban jasa premi Asuransi Kesehatan Non ASN	1 tahun	191,092,660.00	Pencegadaan Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Belopa	Cakupan penyelenggaraan pencegahan kebakaran	1 tahun	260,000,000.00
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat pelindung diri	Kab. Luwu	Jumlah Sarana dan prasarana Pencegahaan, Penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	20 Jenis	-	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat pelindung diri	Belopa	Jumlah Sarana dan prasarana Pencegahaan, Penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	20 Jenis	127,100,000.00
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		-	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Belopa	Cakupan Penyelenggaraan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		12,310,000.00
	Pendataan Sarana dan Prasarana proteksi kebakaran	Kab. Luwu	Dokumen pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	1 Dokumen	-	Pendataan Sarana dan Prasarana proteksi kebakaran	Belopa	Dokumen pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	1 Dokumen	12,310,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahaan Kebakaran	Kab. Luwu	Persentase masyarakat yang diberdayakan dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran		-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahaan Kebakaran		Persentase masyarakat yang diberdayakan dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran		75,000,000.00
	Pembentukan dan Pembinaan relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Luwu	Jumlah Pembinaan relawan pemadaman kebakaran yang mengikuti	22 Kec	-	Pembentukan dan Pembinaan relawan Pemadam Kebakaran	Belopa	Jumlah Pembinaan relawan pemadaman kebakaran yang mengikuti	22 Kec	75,000,000.00
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Luwu	Persentase Jumlah Penyelenggaraan operasi Pencarian, pertolongan penyelamatan dan evakuasi		-	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan tvehadap Kondisi Membahayakan Manusia		Persentase Jumlah Penyelenggaraan operasi Pencarian, pertolongan penyelamatan dan evakuasi		20,000,000.00
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Kab.Luwu	Jumlah Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	1 Tahun	-	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Belopa	Jumlah Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	1 Tahun	20,000,000.00
	BIDANG PENGENDALIAN OPERASI PEMADAMAN & PENYELAMATAN				-	BIDANG PENGENDALIAN OPERASI PEMADAMAN & PENYELAMATAN				45,830,600.00
	Pencegahaan, Pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Persentase Penyelenggaraan Penanganan Bencana yang terlapor		-	Pencegahaan, Pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	Belopa	Persentase Penyelenggaraan Penanganan Bencana yang terlapor		15,000,000.00
	Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah Kejadian Kebakaran yang dilakukan Pemadaman dan Pengendalian	PM	-	Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota	Belopa	Jumlah Kejadian Kebakaran yang dilakukan Pemadaman dan Pengendalian	PM	15,000,000.00
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Kab. Luwu	Jumlah Kejadian Kebakaran yang telah diketahui penyebabnya dalam 1 (satu) tahun	1 tahun	-	Investigasi Kejadian Kebakaran	Belopa	Jumlah Kejadian Kebakaran yang telah diketahui penyebabnya dalam 1 (satu) tahun	1.00	15,830,600.00
	Investigasi Kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian Kebakaran	Kab. Luwu	Jumlah Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran	PM	-	Investigasi Kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian Kebakaran	Belopa	Jumlah Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran	PM	15,830,600.00
	Penyelenggaraan, operasi pencarian dn pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Kab. Luwu	Persentase Jumlah Penyelenggaraan operasi Pencarian, pertolongan penyelamatan dan evakuasi	1 tahun	-	Penyelenggaraan, operasi pencarian dn pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Belopa	Persentase Jumlah Penyelenggaraan operasi Pencarian, pertolongan penyelamatan dan evakuasi	1 tahun	15,000,000.00
	Penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpah, membahayakan dan/atau mengancam	Kab.Luwu	Jumlah Penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpah, membahayakan dan/atau mengancam Keselamatan manusia	PM	-	Penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpah, membahayakan dan/atau mengancam	Belopa	Jumlah Penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpah, membahayakan dan/atau mengancam Keselamatan manusia	PM	15,000,000.00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Luwu

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN								5.915.626.201,00				334.750.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5.915.626.201,00					334.750.000,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								5.915.626.201,00					334.750.000,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.724.533.541,00					111.000.000,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.177.195.601,00					102.600.000,00
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Luwu, Belopa, Belopa	100 Persen	27 Orang/bulan	100 %	3.048.075.601,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	0,00
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Dokumen	100 %	129.120.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	102.600.000,00
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								8.400.000,00					8.400.000,00
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	100 %	8.400.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.400.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								281.225.505,00					0,00

1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	10 Paket	100 %	4.345.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	0,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	10 Paket	100 %	21.915.700,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	0,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	15 Paket	100 %	9.578.200,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	0,00
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Dokumen	100 %	11.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	0,00
1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	25 Paket	100 %	17.993.605,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket	0,00
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Laporan	100 %	37.014.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	0,00

1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	50 Laporan	100 %	167.379.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	0,00
1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	12 Dokumen	100 %	12.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.097.815.500,00					0,00	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	35 Laporan	100 %	33.120.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35 Laporan	0,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	12 Laporan	100 %	63.550.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	12 Laporan	100 %	8.545.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00

1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	12 Laporan	100 %	1.992.600.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								159.896.935,00					0,00
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	6 Unit	100 %	27.756.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	0,00
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	12 Unit	100 %	113.950.350,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	0,00
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	6 Unit	100 %	12.119.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	0,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	5 Unit	100 %	6.071.285,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	5 Unit	0,00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								191.092.660,00					191.250.000,00
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								191.092.660,00					191.250.000,00

1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Kawasan	100.00 %	191.092.660,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	12 Kawasan	191.250.000,00
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							0,00					32.500.000,00
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah							0,00					32.500.000,00
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang terlapor Cakupan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Cakupan penyelenggaraa n perlindungan masyarakat	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 100 Persen 100 Persen	20 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulan an Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 Unit	32.500.000,00
TOTAL												5.915.626.201,00					334.750.000,00

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%			5,724,533,541	DAU	Dinas Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	%			3,177,195,601	DAU	Dinas Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan				3,048,075,601		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					1,239,254,000		
	- Belanja Gaji Pokok PNS (belanja Gaji dan tanjungan)			1 tahun	1,239,254,000	1,239,254,000		
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					562,203,600		
	- Belanja Gaji Pokok PPPK			1 tahun	562,203,600	562,203,600		
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					189,466,000		
	- Belanja Tunjangan Keluarga PNS			1 tahun	189,466,000	189,466,000		
5.1.01.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					54,897,528		
	- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			1 tahun	54,897,528	54,897,528		
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					118,790,000		
	- Belanja tunjangan Jabatan PNS			1 tahun	118,790,000	118,790,000		
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					45,360,000		
	- Belanja tunjangan Jabatan PNS			1 tahun	45,360,000	45,360,000		
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					28,772,000		
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)			1 Tahun	28,772,000	28,772,000		
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					86,256,000		
	- Belanja Tunjangan Beras PNS			1 tahun	86,256,000	86,256,000		
5.1.01.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					48,666,240		
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK			1 tahun	48,666,240	48,666,240		
5.1,01,01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					2,092,000		
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			1 tahun	2,092,000	2,092,000		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembuatan Gaji PNS					16,000		
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS			1 tahun	16,000	16,000		
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembuatan Gaji PPPK					13,062		

	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK			1 tahun	13,062	13,062		
5.1.01.01.09.0001	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS					79,840,000		
	- Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)			1 tahun	79,840,000	79,840,000		
5.1.01.01.09.0002	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PPPK					24,684,045		
	- Belanja iuran Jaminan Kesehatan PPPK			1 tahun	24,684,045	24,684,045		
5.1.01.01.10.0001	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan kerja PNS					2,550,000		
	- Belanja iuran Jaminan Kecelakaan kerja PNS			1 tahun	2,550,000	2,550,000		
5.1.01.01.10.0002	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan kerja PPPK					1,349,222		
	- Belanja iuran Jaminan Kecelakaan kerja PPPK			1 tahun	1,349,222	1,349,222		
5.1.01.01.11.0001	Belanja iuran jaminan kematian PNS					7,648,000		
	- Belanja iuran jaminan kematian PNS			1 tahun	7,648,000	7,648,000		
5.1.01.01.11.0001	Belanja iuran jaminan kematian PPPK					4,047,904		
	- Belanja iuran jaminan kematian PPPK			1 tahun	4,047,904	4,047,904		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					600,080,000		
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			1 tahun	600,080,000	600,080,000		
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) Tahun				129,120,000		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					129,120,000		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan					102,600,000		
	- Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan - bendahara pengeluaran atau bendahara penerima/sta pengelola keuangan		OB	12 Orang/bulan	860,000	10,320,000		
	- Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan - PPTK		OB	24 Orang/bulan	2,210,000	53,040,000		
	- Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan - PPK SKPD		OB	12 Orang/bulan	990,000	11,880,000		
	- Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan - Pengguna Anggaran		OB	12 Orang/bulan	2,280,000	27,360,000		
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					26,520,000		
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa		OB	12 orang/bulan	2,210,000	26,520,000		
1.05.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi barang milik daerah pada SKPD	%			8,400,000	DAU	Dinas Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Daerah	Jumlah Penatausahaan Mlik daerah pada SKPD				8,400,000		
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					8,400,000		
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan					8,400,000		
	- Honorarium Pengurus Barang		OB	12 Orang/Bulan	700,000	8,400,000		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi Umum perangkat daerah	%			281,225,505	DAU	Dinas Pemadam Kebakaran

1.05.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan gedung kantor yang disediakan				4,345,000		
5.1.02.01.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					4,345,000		
	Kabel (2 X 2.5mm)		Meter	7 Meter	17,000	119,000		
	Penangkal Petir 3/4 (Non tembaga)		buah	4 buah	60,000	240,000		
	Kayu rose ganda		buah	2 buah	14,000	28,000		
	Balon lampu (41 watt)		Buah	10 Buah	34,200	342,000		
	Balon lampu (15 watt)		buah	10 Buah	75,600	756,000		
	Kawat BC (BC 6 mm)		buah	100 Buah	28,600	2,860,000		
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik yang disediakan				21,915,700		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					21,915,700		
5.1.02.01.01.0043	Belanja natura dan Pakan - Natura					21,915,700		
	- susu kental manis (545 gr)		Buah	1 Buah	21,000	21,000		
	- Kopi Bubuk (23 gr/Mlx)		per bungkus	74 per bungkus	18,000	1,332,000		
	- Mie Instansi		per bungkus	649 per bungkus	3,500	2,271,500		
	- Air Meneral Galon (isi ulang biasa)		Kali	1474 Kali	5,750	8,475,500		
	- Gula Pasir (1kg)		Kg	300 Kg	18,300	5,490,000		
	- Minyak Goreng (1 Liter)		Perbungkus	60 perbungkus	44,250	2,655,000		
	- Air Mineral (48 X 220 ml premium)		Dos	22 dos	73,200	1,610,400		
	Kecap Asin (140 ml)		Botol	2 Botol	5,400	10,800		
	- Air Mineral (600 ml)		Botol	9 Botol	5,500	49,500		
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis cetakan dan pnggadaan yang disediakan				9,578,200		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9,578,200		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					9,578,200		
	- Baliho/spanduk		Meter	12 meter	45,000	540,000		
	- cetak blanko (Uk, 14 X 27,5 Cm)		Lembar	1000 Lembar	3,055	3,055,000		
	- cetak SPPT (NaN)		Ekssemplar	15 Exempler	32,000	480,000		
	- Foto copy (NaN)		Lembar	11359 Lembar	400	4,543,600		
	- Cetak Lembar Disposisi (NaN)		lembar	899 lembar	400	359,600		
	- Jilid Antero Biasa (150-200 Lembar)		Eksemplar	10 eksemplar	39,000	390,000		
	- Cetak sertifikasi (linem/kertas photo/kingsroad)		lembar	14 lembar	15,000	210,000		
1.05.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				11,000,000		
	Belanja Jasa Kantor					11,000,000		
	- Beban Jasa surat kabar/majalah		Eksemplar	100 eksemplar	110,000	11,000,000		
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun				17,993,605		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					17,993,605		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5,728,220		
	- Tote Bag (NaN)		Buah	1 buah	15,000	15,000		
	- Ballpoint Balliner		lusin	10 lusin	177,250	1,772,500		
	- Buku agenda		Buah	2 Buah	42,250	84,500		
	- Buku ekspedisi		Buah	1 buah	13,720	13,720		
	- Hekter (jilid kecil)		Buah	1 buah	84,500	84,500		
	- Isi hekter (23/24)		Dos	50 Dos	52,000	2,600,000		
	- lakban jilid besar (72 mm(3"))		buah	2 Buah	39,000	78,000		

	- plastik file		perbungkus	40 perbungkus	25,000	1,000,000		
	- seminar Kit		Eksemplar	4 eksemplar	20,000	80,000		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					9,520,940		
	- kertas HVS (80 gram folio (F4))		Rim	15 rim	84,500	1,267,500		
	- Kertas HVS (75 gram A4)		Rim	40 rim	67,600	2,704,000		
	- Kertas HVS (75 gram quarto)		Rim	70 rim	65,000	4,550,000		
	- Map Kertas Snelhektekter (lobang)		lembar	100 lembar	1,300	130,000		
	- Map plastik (kancing)		lusin	20 Lusin	42,900	858,000		
	- map kertas (biasa)		Lembar	10 lembar	1,144	11,440		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer					2,744,445		
	- catridge + ribbon		Buah	11 buah	78,000	858,000		
	- Tinta Print		Botol	15 botol	125,763	1,886,445		
1.05.01.2.06.08	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis jamuan makanan dan minuman yang tersedia				37,014,000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					37,014,000		
5.1.02.01.01.0043	Belanja natura dan Pakan - Natura					9,064,000		
	- Air Mineral (600 ml)		Botol	264 Botol	5,500	1,452,000		
	- Biskuit Kaleng (Assorted 650 gr)		Kaleng	30 Kaleng	63,950	1,918,500		
	- Kopi bubuk (23 gr/Mix)		perbungkus	100 perbungkus	18,000	1,800,000		
	- minuman teh celup (25 X 2 gr)		Buah	100 Buah	11,000	1,100,000		
	- Gula Pasir (1 Kg)		Kg	100 Kg	18,300	1,830,000		
	- Susu kental Manis (545 gr)		Buah	45 Buah	21,000	945,000		
	Minuman Susu Steril/UHT (200ml)		Buah	1 buah	9,500	9,500		
	- Minuman Susu Steril/UHT (125ml)		buah	2 buah	4,500	9,000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					27,950,000		
	- Makan dan Minuman rapat/pertemuan/lembur		Kotak	910 Kotak	27,500	25,025,000		
	- Snack/kudapan		Kotak	195 Kotak	15,000	2,925,000		
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Perjalanan dinas luar daerah				167,379,000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					167,379,000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					133,304,000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					133,304,000		
	Eselon II					30,790,000		
	- Uang Harian		OH	13 orang/hari	430,000	5,590,000		
	- Presentatif		OH	13 orang/hari	150,000	1,950,000		
	- Biaya Penginapan		OH	15 orang/hari	1,550,000	23,250,000		
	ESELON III/GOLONGAN IV					38,820,000		
	- Uang Harian		OH	21 Orang/hari	430,000	9,030,000		
	- Biaya Penginapan		Orang/kali	22 Orang/kali	1,020,000	22,440,000		
	- Biaya transportasi Darat - Makassar Kab Luwu		OH	21 Orang/kali	350,000	7,350,000		
	ESELON IV					34,536,000		
	- Biaya Penginapan perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III - sulawesi selatan		Orang/hari	28 Orang/hari	732,000	20,496,000		
	- Biaya Transportasi Darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama - makassar kab.lwu		Orang/kali	18 Orang/kali	350,000	6,300,000		

	- satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota - SULAWESI SELATAN		OH	18 Kali	430,000	7,740,000		
	GOLONGAN II					13,178,000		
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Golongan I, II/PPPK/Non PNS		OH	9 orang/hari	732,000	6,588,000		
	- Biaya Transportasi Darat dari ibukota Provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama - Makassar Kab. Luwu		orang/kali	9 orang/hari	350,000	3,150,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota (Golongan II/Golongan I/PPPK)		Orang/hari	8 orang/hari	430,000	3,440,000		
	GOLONGAN III					9,932,000		
	- Uang Harian		OH	8 orang/hari	430,000	3,440,000		
	- Biaya Penginapan		Orang/kali	6 Kali	732,000	4,392,000		
	- Biaya transportasi Darat - Makassar Kab Luwu		Orang/hari	6 orang/hari	350,000	2,100,000		
	NON PNS					6,048,000		
	- Uang Harian		Orang/Hari	4 orang/hari	430,000	1,720,000		
	- Biaya Penginapan		OH	4 orang/hari	732,000	2,928,000		
	- Biaya transportasi Darat - Makassar Kab Luwu		Orang/kali	4 Kali	350,000	1,400,000		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					34,075,000		
						10,375,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Daerah PNS Eselon IV/Golongan III		OH	35 orang/hari	125,000	4,375,000		
	- Uang Harian perjalanan dinas dalam Daerah - PNS Golongan I dan Golongan II/PPPK/Non ASN		OH	60 orang/hari	100,000	6,000,000		
	Eselon II					14,700,000		
	- Uang Harian - Eselon II		OH	60 orang/hari	170,000	10,200,000		
	Uang Representatif dalam Daerah - Eselon II		OH	60 orang/hari	75,000	4,500,000		
	Eselon III					9,000,000		
	- Uang Harian - PNS Eselon III/ Golongan IV		Orang/hari	60 orang/hari	150,000	9,000,000		
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Ssistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD				12,000,000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					12,000,000		
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					12,000,000		
	- User SIPD SKPD		Orang/Bulan	12 Bulan	1,000,000	12,000,000		
1.05.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%			2,097,815,500	DAU	Dinas Pemadam Kebakaran
1.05.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Ssurat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang diregister				33,120,000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai habis					4,320,000		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					4,320,000		
	- Materai - 10000		Lembar	360 lembar	12,000	4,320,000		

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					28,800,000		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					8,400,000		
	- Jasa Upah Kerja Staf Penunjang Kegiatan Perkantoran _ Staf Administrasi/agendaris/aspri		OB	12 Orang/bulan	700,000	8,400,000		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					12,000,000		
	- Asisten Pribadi Unsur Pimpinan		Orang/Bulan	12 Bulan	1,000,000	12,000,000		
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					8,400,000		
	- Honorarium tenaga pendukung - Tenaga caraka		Orang/bulan	12 Orang/bulan	700,000	8,400,000		
1.05.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telpon, air dan listrik				63,550,500		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					63,550,500		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					33,130,500		
	- Listrik rumah tangga (R-2/TR)- 3.500VA s.d 5.500 VA		KWH	19500	1,699	33,130,500		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					30,420,000		
	- Internet - paket 1:1 10 Mb		perbulan	12 Bulan	2,500,000	30,000,000		
	- Beban jasa kantor lainnya - lunran TV		Bulan	12 bulan	35,000	420,000		
1.05.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	%			8,545,000		
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin					5,325,000		
	- Jasa servis (Bongkar Pasang AC)		kali	15 Kali	355,000	5,325,000		
5.1.02.03.02.0405	Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer					2,700,000		
	- Jasa servis (Laptop/komputer PC)		Kali	9 Kali	300,000	2,700,000		
5.1.02.03.02.0409	Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer					520,000		
	- Jasa servis (Printer)		Kali	4 Kali	130,000	520,000		
1.05.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	%			1,992,600,000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1,992,600,000		
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					1,427,400,000		
	- Petugas Pemadam Kebakaran		OB	864	1,350,000	1,166,400,000		
	- Petugas Pemadam Kebakaran Komandan Regu		OB	180	1,450,000	261,000,000		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					50,400,000		
	- Jasa Upah Kerja Staf Penunjang Kegiatan Perkantoran _ Staf Administrasi		OB	72	700,000	50,400,000		
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator komputer					36,000,000		
	- Beban jasa kantor lainnya - Operator komputer		Orang/bulan	36	1,000,000	36,000,000		
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir mobil Pemadam Kebakaran					403,200,000		
	- Supir Pemadam Kebakaran		Orang/bulan	288	1,400,000	403,200,000		
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					75,600,000		
	- Jasa upah kerja pengelola SIMDA/SIPD - Operator SIMDA SKPKD/SKPD		OB	12	1,200,000	57,600,000		
	- Honorarium Tenaga Pendukung - operator SIMDA/SIPD/SKPKD		OB	48	1,500,000	18,000,000		
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Barang milikndaerah penunjang urusan pemerintahan daerah				159,896,935	DAU	Dinas Pemadam Kebakaran

1.05.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan Rutin/Berkala				27,756,000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9,756,000		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					9,756,000		
	- Pertamina		Liter	720 liter	13,550	9,756,000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					18,000,000		
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					18,000,000		
	- Honorarium Tenaga pendukung - Sopir		OB	12 Orang/bulan	1,500,000	18,000,000		
1.05.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan Rutin/Berkala				113,950,350		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					101,464,350		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					45,477,000		
	- Dexlite		liter	3260 liter	13,950	45,477,000		
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan					55,987,350		
	- Aki Mobil		Buah	5 buah	1,200,000	6,000,000		
	- Angker tangan		Buah	3 buah	1,504,650	4,513,950		
	- Ban Luar mobil (350 195/65 R15		Buah	5 buah	1,418,550	7,092,750		
	- Kampas Komplit		Buah	2 Buah	3,607,800	7,215,600		
	- Matahari		Buah	8 buah	3,239,250	25,914,000		
	- Ball Join		Buah	1 Buah	1,796,550	1,796,550		
	- Ban dalam R15		Buah	5 buah	149,100	745,500		
	- Lahar pinion belakang		Buah	4 buah	677,250	2,709,000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					12,486,000		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					12,486,000		
	- pajak Kendaraan Bermotor (Roda Enam)		Unit	6 Unit	2,081,000	12,486,000		
1.05.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Pealatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				12,119,300		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2,085,600		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya					2,085,600		
	- Alat tangkap (tangkap Ular 150 cm)		unit	4 Unit	521,400	2,085,600		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin					10,033,700		
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumag tangga - Alat rumah tangga - Alat pemadam kebakaran					10,033,700		
	- Pistol grip pemadam (1.5 Inci)		Buah	1	4,017,100	4,017,100		
	- Selang Pemadam (1,5 inci X 30 Meter)		Buah	2	1,735,700	3,471,400		
	- Selang Pemadam (2,5 inci X 30 Meter)		Buah	1	2,545,200	2,545,200		
1.05.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				6,071,285		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6,071,285		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-bahan bangunan dan konstruksi					6,071,285		
	- Minyak cat/Thinner		liter	5 liter	44,110	220,550		
	- Besi type C (besi ranka baja ringan) 6 mm (zona V)		batang	7 batang	232,050	1,624,350		
	- Paku (zona) - Paku atap spandek baja		biji	250 biji	1,365	341,250		
	- Cat (Zona II) Cat tembok mowilex		Kaleng	15	259,009	3,885,135		

1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	%			191,092,660	DAU	Dinas Pemadam Kebakaran
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/ Kota	Beban Jasa Asuransi Kesehatan Non ASN Jumlah Dokumen SPM Pencegahan/penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota				191,092,660	DAU	Dinas Pemadam Kebakaran
1.05.04.2.01.01	Pencegahaan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah pencegahaankebakaran dalam daerah kabupaten/kota				191,092,660		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2,250,000		
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					2,250,000		
	- Isi Tabung Pemadam Kebakaran Lainnya - isi ulang tabung pemadam kebakaran		Kg	30 Kg	75,000	2,250,000		
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/asuransi					188,842,660		
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan kesehatan bagi non ASN					188,842,660		
	- IuranJaminan Kesehatan Bagi Non ASN - Iuran Jaminan Kesehatan Pemaam Kebakaran		Tahun	1 Tahun	188,842,660	188,842,660		
						5,915,626,201		